

REINDUSTRIALISASI DAN KEBANGKITAN INDUSTRI PADAT KARYA

Strategi Tekstil-Agro-Energi

di Tengah Tekanan Global



Oleh

RUDY C TARUMINGKENG

Rudy C Tarumingkeng : *Reindustrialisasi dan Kebangkitan Industri
Padat Karya - Strategi Tekstil–Agro–Energi di Tengah Tekanan Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

2 Maret 2026

REINDUSTRIALISASI DAN KEBANGKITAN INDUSTRI PADAT KARYA: STRATEGI TEKSTIL– AGRO–ENERGI DI TENGAH TEKANAN GLOBAL

Pendahuluan

Perbincangan tentang reindustrialisasi kini kembali menempati pusat perhatian, bukan karena romantisme masa lalu ketika manufaktur dipandang sebagai “mesin pertumbuhan” klasik, melainkan karena dunia sedang memasuki fase baru globalisasi yang jauh lebih keras, terfragmentasi, dan sarat ketidakpastian. Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025–2026 cenderung tertahan di sekitar 2,7 persen; WTO pada pembaruan Oktober 2025 memproyeksikan volume perdagangan barang dunia hanya tumbuh 2,4 persen pada 2025 dan melambat menjadi 0,5 persen pada 2026; sementara UNCTAD menyebut globalisasi telah memasuki *inflection point* akibat kombinasi ketegangan geopolitik, perubahan teknologi, transisi hijau, dan kecenderungan *home-shoring* serta *friend-shoring*. Pada saat yang sama, IEA mencatat permintaan listrik global melonjak 4,3 persen pada 2024, dengan sektor industri menyumbang hampir 40 persen dari pertumbuhan tersebut. Artinya, industri masa kini harus hidup di bawah tekanan simultan: pasar global yang melambat, tarif dan hambatan dagang yang meningkat, energi yang makin menentukan

daya saing, dan teknologi yang mempercepat seleksi antara pemenang dan pecundang. ([Open Knowledge Repository](#))

Dalam konteks itu, reindustrialisasi bagi negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat dimaknai sekadar sebagai upaya menaikkan jumlah pabrik atau memperbesar output manufaktur. Reindustrialisasi harus dimaknai sebagai proses membangun kembali kapasitas produksi nasional agar lebih dalam strukturnya, lebih tinggi produktivitasnya, lebih luas penciptaan kerjanya, dan lebih kuat ketahanannya terhadap guncangan global. UNIDO, melalui *Industrial Development Report 2024*, bahkan menegaskan bahwa era baru kebijakan industri harus bertumpu pada digitalisasi, penciptaan lapangan kerja, dan dekarbonisasi industri. Dengan kata lain, industri abad ke-21 tidak cukup hanya “besar”; ia harus juga tangguh, inklusif, efisien energi, dan mampu belajar secara teknologi. ([UNIDO](#))

Indonesia memiliki alasan yang sangat kuat untuk menempatkan agenda ini di garis depan. Sektor manufaktur masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, dengan kontribusi 17,39 persen pada triwulan III 2025. Pada triwulan II 2025, industri pengolahan tumbuh 5,68 persen, ditopang terutama oleh makanan dan minuman, logam dasar, serta kimia/farmasi. Namun di balik angka pertumbuhan itu terdapat tantangan struktural yang nyata: laporan Bank Dunia tentang Indonesia menegaskan bahwa pengolahan makanan dan pakaian jadi—dua sektor terbesar manufaktur Indonesia—menyumbang lebih dari seperempat nilai tambah manufaktur dan hampir sepertiga lapangan kerja manufaktur, tetapi perusahaan-perusahaan besar di sektor itu justru termasuk yang paling jauh dari *technology frontier*. Di sisi lain, laporan Bank Dunia yang lain menunjukkan bahwa tekstil dan pakaian jadi menghadapi tantangan pascapandemi berupa melemahnya permintaan ekspor, pembatasan impor yang makin ketat di berbagai pasar, PHK, dan penurunan pangsa dalam nilai tambah manufaktur dari 6,2 persen pada 2019 menjadi 5,2 persen pada 2023. ([KPAII](#))

Karena itu, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Indonesia perlu reindustrialisasi, melainkan **bagaimana** reindustrialisasi itu dirancang. Esai ini berargumen bahwa kebangkitan industri padat karya tetap sangat relevan, tetapi ia tidak boleh dibayangkan dalam format lama yang hanya mengandalkan upah murah. Strategi yang lebih masuk akal adalah membangun poros **tekstil–agro–energi** sebagai tiga lapis fondasi baru industrialisasi: tekstil sebagai mesin kerja cepat dan ekspor yang masih penting; agro sebagai basis nilai tambah berbasis sumber daya domestik dan penyerap tenaga kerja wilayah; serta energi sebagai platform kompetitivitas yang menentukan biaya, kepastian pasokan, dan keberhasilan transisi industri. Reindustrialisasi yang berhasil bukanlah memilih antara industri padat karya atau industri maju, melainkan menjadikan industri padat karya sebagai tangga awal menuju struktur produksi yang makin produktif, formal, hijau, dan berteknologi.

1. Reindustrialisasi: Mengapa Kembali Menjadi Agenda Strategis?

Dalam teori pembangunan, manufaktur selalu menempati posisi khusus karena kemampuannya menggabungkan tiga fungsi sekaligus: menaikkan produktivitas, memperluas pekerjaan formal, dan menciptakan keterkaitan ke belakang dan ke depan dalam perekonomian. Dibandingkan banyak sektor jasa berproduktivitas rendah, manufaktur memungkinkan pembelajaran teknis, standardisasi mutu, akumulasi modal, dan penguatan rantai pasok. Bagi negara dengan tenaga kerja besar seperti Indonesia, industri juga berfungsi sebagai jembatan antara surplus tenaga kerja berproduktivitas rendah di sektor informal atau pertanian primer menuju pekerjaan yang lebih stabil, lebih terukur, dan lebih mudah ditingkatkan keterampilannya. ILO masih mencatat *global jobs gap* sebesar 402 juta orang pada 2024, menunjukkan bahwa persoalan penciptaan kerja layak belum selesai, terutama di negara berkembang. Itu sebabnya, kebangkitan industri padat karya bukan agenda usang, tetapi respons rasional atas kebutuhan penyerapan kerja dalam skala besar. ([International Labour Organization](#))

Akan tetapi, reindustrialisasi hari ini tidak dapat meniru pola industrialisasi abad ke-20. Dulu, banyak negara naik kelas melalui formula sederhana: upah murah, akses pasar ekspor, stabilitas makro, dan investasi pabrik skala besar. Kini, formula itu tidak lagi cukup. WTO menunjukkan dunia menghadapi tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan dagang yang menggerus prospek perdagangan. UNCTAD mengingatkan bahwa teknologi baru—dari AI hingga material sintetis—berpotensi mengubah pembagian kerja global. Reuters juga melaporkan bahwa perusahaan seperti H&M mempercepat pengalihan rantai pasok ke lokasi yang lebih dekat dengan pasar akhir, sementara On Running membuka pabrik sepatu berteknologi robotik di Korea Selatan untuk mengurangi risiko rantai pasok dan ketergantungan pada lokasi berupah murah yang jauh. Pesannya jelas: negara yang hanya menjual “tenaga kerja murah” akan makin rentan; negara yang mampu mengombinasikan biaya kompetitif, keandalan energi, kepastian regulasi, dan kemampuan teknologi akan lebih berpeluang menarik investasi baru. ([World Trade Organization](#))

Bagi Indonesia, reindustrialisasi juga penting karena pertumbuhan berbasis komoditas semata memiliki keterbatasan. Ketika harga komoditas tinggi, ekonomi tampak kuat; ketika harga turun atau permintaan global melemah, kerentanan muncul. Laporan Bank Dunia tentang Indonesia menegaskan bahwa konsentrasi pertumbuhan manufaktur pada logam dasar dan industri terkait komoditas dapat menimbulkan kerentanan terhadap guncangan sektoral dan volatilitas harga komoditas. Sementara itu, beberapa industri prioritas lain justru tertinggal. Dengan demikian, agenda reindustrialisasi tidak boleh hanya berkisar pada hilirisasi mineral, meskipun itu penting, tetapi juga harus menghidupkan kembali sektor yang lebih luas penyerapannya terhadap tenaga kerja: tekstil, pakaian jadi, makanan olahan, furnitur, alas kaki, serta berbagai turunan agroindustri. ([World Bank](#))

Di sinilah konsep “kebangkitan industri padat karya” harus dipahami secara lebih cerdas. Ia bukan proyek mempertahankan produktivitas rendah, melainkan proyek mempertemukan **skala kerja** dengan **kenaikan produktivitas bertahap**. Dalam bahasa sederhana, negara memerlukan jutaan pekerjaan baru, tetapi pekerjaan itu tidak boleh berhenti sebagai pekerjaan murah; ia harus menjadi pintu masuk untuk pelatihan, standarisasi, modernisasi mesin, digitalisasi proses, dan pada akhirnya peningkatan upah yang didukung produktivitas. Jadi, reindustrialisasi yang sehat bukan bertumpu pada upah rendah permanen, melainkan pada **biaya total yang efisien**: energi yang andal, logistik yang lancar, pembiayaan yang masuk akal, bahan baku yang tersedia, regulasi yang sederhana, dan teknologi yang meningkat.

2. Tekanan Global: Dunia yang Tidak Lagi Ramah bagi Industrialisasi Pasif

Tekanan pertama adalah **melambatnya pertumbuhan global**. Ketika pertumbuhan dunia tertahan di kisaran rendah, permintaan terhadap barang manufaktur ikut melemah atau setidaknya tumbuh jauh lebih hati-hati. Bagi negara pengekspor seperti Indonesia, ini berarti strategi ekspor tidak bisa lagi bertumpu pada asumsi bahwa pasar global akan menyerap hampir semua tambahan produksi. Pasar masih ada, tetapi lebih selektif, lebih sensitif harga, dan lebih ketat dalam standar mutu, keberlanjutan, serta kepatuhan rantai pasok. ([Open Knowledge Repository](#))

Tekanan kedua adalah **fragmentasi perdagangan**. WTO pada pembaruan Oktober 2025 memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia hanya 0,5 persen pada 2026, turun tajam dari 2,4 persen pada 2025. Sinyal ini penting karena menunjukkan bahwa dunia perdagangan tidak lagi bergerak dalam pola ekspansi yang mulus. Dalam laporan sebelumnya pada April 2025, WTO bahkan telah menyoroti bahwa gelombang tarif baru dan ketidakpastian kebijakan

dapat menyeret perdagangan barang dunia ke kontraksi. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa sebagian tarif Amerika Serikat telah mendorong relokasi sumber pasok pakaian dari China ke negara-negara lain, sekaligus menciptakan ketidakpastian baru bagi eksportir Asia. Dengan kata lain, perusahaan global kini terus menata ulang peta produksinya, bukan semata karena ongkos tenaga kerja, tetapi karena risiko geopolitik dan tarif. ([World Trade Organization](#))

Tekanan ketiga adalah **kompetisi biaya energi**. Industri modern bukan hanya soal upah, tetapi juga soal listrik, gas, panas industri, dan kestabilan pasokan. Reuters melaporkan bahwa pemimpin bisnis Eropa menekan pemerintah Uni Eropa untuk menurunkan harga energi karena dianggap merusak daya saing industri terhadap Amerika Serikat dan China. Berarti, bahkan ekonomi maju pun kini mengakui bahwa harga energi dapat menentukan keputusan investasi dan lokasi produksi. Bagi Indonesia, pelajarannya tegas: tanpa energi yang terjangkau dan andal, keunggulan upah murah akan cepat tergerus. ([Reuters](#))

Tekanan keempat adalah **otomasi dan regionalisasi rantai pasok**. Pabrik robotik sepatu On Running di Korea Selatan memperlihatkan arah baru industri global: sebagian tahapan produksi yang dulu otomatis mencari lokasi upah murah kini bisa dipindahkan lebih dekat ke pasar melalui otomasi. H&M juga mempercepat pembelian dari pemasok yang lebih dekat ke pasar utama di Eropa dan Amerika Serikat sebagai persiapan atas ancaman tarif. Ini tidak berarti semua industri padat karya akan lenyap, tetapi berarti negara pemasok harus menawarkan lebih dari sekadar buruh murah. Mereka harus menawarkan kecepatan pengiriman, kepastian mutu, jejak karbon yang lebih baik, energi yang relatif bersih, dan kepatuhan sosial yang dapat diaudit. ([Reuters](#))

Tekanan kelima adalah **transisi hijau dan tuntutan keberlanjutan**. UNIDO menempatkan dekarbonisasi industri sebagai bagian dari era baru kebijakan industri. Reuters juga mencatat bahwa industri fesyen

menghadapi tekanan untuk membantu pemasok berinvestasi pada energi terbarukan dan efisiensi energi, karena keberlanjutan bukan lagi sekadar isu reputasi, melainkan semakin terkait dengan daya saing dan akses pasar. Ini sangat relevan untuk tekstil Indonesia, sebab ekspor ke pasar premium akan makin dipengaruhi oleh kemampuan pembuktian bahwa produk dibuat dengan energi lebih bersih, air lebih efisien, dan praktik kerja yang lebih layak. ([UNIDO](#))

Tekanan keenam adalah **risiko guncangan energi dan geopolitik**. Pada 1 Maret 2026, Reuters melaporkan lonjakan harga minyak dan kemacetan tanker di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Bagi negara industri yang masih sangat bergantung pada energi fosil impor atau komponen biaya energi global, guncangan semacam ini dapat segera menjalar menjadi inflasi biaya, gangguan logistik, dan tekanan terhadap kurs. Karena itu, strategi industri tidak boleh dipisahkan dari strategi ketahanan energi. ([Reuters](#))

Seluruh tekanan ini mengarah pada satu kesimpulan: **industrialisasi pasif**—yakni menunggu pasar global datang, memberi insentif umum, dan berharap investor otomatis masuk—tidak lagi memadai. Yang diperlukan adalah **industrialisasi strategis**, yakni kebijakan yang sengaja membangun kombinasi sektor, lokasi, infrastruktur, pembiayaan, dan standar agar Indonesia relevan dalam peta produksi baru.

3. Mengapa Industri Padat Karya Masih Penting?

Ada pandangan yang kadang muncul bahwa industri padat karya adalah tahap yang sebaiknya dilompati; bahwa masa depan terletak pada AI, chip, kendaraan listrik, atau industri teknologi tinggi. Pandangan ini benar sebagian, tetapi berbahaya jika diterapkan secara absolut di negara yang masih menghadapi kebutuhan penyerapan kerja sangat besar. Indonesia tidak sedang memilih antara “pekerjaan masa depan” dan “pekerjaan hari ini”; Indonesia memerlukan keduanya.

Bank Dunia menunjukkan bahwa dua sektor besar manufaktur Indonesia—pengolahan makanan dan pakaian jadi—bersama-sama menyumbang lebih dari seperempat nilai tambah manufaktur dan hampir sepertiga pekerjaan manufaktur. Fakta ini penting. Dalam desain kebijakan publik, sektor dengan basis kerja sebesar itu tidak dapat diabaikan hanya karena tingkat teknologinya belum tinggi. Justru di situlah peluang transformasi berada: modernisasi di sektor-sektor besar yang sudah ada akan memberikan dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih luas daripada membangun pulau-pulau teknologi yang sangat canggih tetapi serapan kerjanya tipis. ([World Bank](#))

Industri padat karya penting setidaknya karena lima alasan. Pertama, ia menyediakan **pekerjaan formal dalam skala besar** bagi pekerja dengan keterampilan menengah-bawah, yang jumlahnya masih dominan. Kedua, ia lebih mudah disebarkan ke luar pusat metropolitan, sehingga membantu pemerataan wilayah. Ketiga, ia menciptakan **permintaan turunan** untuk logistik, kemasan, perbankan, pelatihan, dan jasa pendukung lain. Keempat, ia menjadi **sekolah produktivitas**: pekerja belajar disiplin mutu, target waktu, penggunaan mesin, dan koordinasi produksi. Kelima, ia menjadi **basis politik-ekonomi inklusi**; negara yang gagal menyediakan pekerjaan industri cenderung menghadapi pembesaran sektor informal, ketimpangan regional, dan keresahan sosial.

Namun pentingnya industri padat karya bukan alasan untuk memelihara model lama yang eksploitatif. Reuters melaporkan bahwa Italia dan pelaku industri fesyen menandatangani rencana aksi untuk memerangi eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok fesyen setelah sejumlah penyelidikan mengungkap praktik kerja yang buruk. Pelajaran bagi Indonesia sangat penting: kebangkitan industri tekstil dan agro tidak boleh dibayar dengan pengabaian standar kerja, keselamatan, atau kepatuhan sosial. Industri yang murah tetapi reputasinya buruk pada

akhirnya akan kalah di pasar yang makin menuntut transparansi.

(Reuters)

Dengan demikian, pertanyaan yang tepat bukan “apakah industri padat karya modern atau tidak?”, melainkan “bagaimana membuat industri padat karya menjadi **padat karya yang produktif, formal, bersih, dan naik kelas?**” Di sinilah poros tekstil–agro–energi menjadi relevan.

4. Strategi Tekstil: Dari Industri Upah Murah ke Ekosistem Nilai Tambah

Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan kandidat paling jelas untuk agenda kebangkitan industri padat karya. Alasannya sederhana: ia menyerap banyak tenaga kerja, punya jejak produksi dari hulu ke hilir, dan masih terhubung kuat ke pasar ekspor maupun pasar domestik. Namun justru karena itulah sektor ini paling telanjang menghadapi tekanan global.

Bank Dunia mencatat bahwa tekstil dan pakaian jadi di Indonesia menghadapi melemahnya permintaan ekspor di pasar maju, pembatasan impor yang makin ketat, PHK, dan penurunan pangsa dalam nilai tambah manufaktur dari 6,2 persen pada 2019 menjadi 5,2 persen pada 2023. Pada saat yang sama, laporan Bank Dunia 2026 menunjukkan bahwa sektor apparel Indonesia masih jauh dari *technology frontier*. Artinya, masalah tekstil Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga produktivitas, teknologi, dan posisi dalam rantai nilai. (World Bank)

Maka, strategi tekstil tidak boleh berhenti pada slogan “selamatkan industri tekstil”. Ia harus dipecah menjadi beberapa agenda praktis.

a. Revitalisasi mesin dan produktivitas

Pemerintah Indonesia sudah mengarah ke sini. Reuters pada Maret 2025 melaporkan bahwa pemerintah menyiapkan kredit investasi yang menanggung 5 persen bunga pinjaman untuk industri padat karya, termasuk tekstil dan barang kulit. Kemenperin kemudian merinci skema

Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dengan plafon Rp20 triliun pada 2025, tenor hingga delapan tahun, subsidi bunga 5 persen per tahun, dan sasaran 2.000–10.000 usaha. Subsektor penerima mencakup tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, dan mainan anak. Ini langkah penting karena banyak pabrik tekstil Indonesia sesungguhnya tidak kalah niat, tetapi kalah umur mesin. Tanpa modernisasi peralatan, mereka sulit menandingi pesaing yang lebih efisien dalam konsumsi listrik, kecepatan produksi, dan konsistensi mutu. [\(Reuters\)](#)

Tetapi revitalisasi mesin harus dikaitkan dengan *conditional upgrading*. Artinya, pembiayaan murah semestinya tidak hanya mengejar kelangsungan usaha, tetapi disertai target kenaikan produktivitas, efisiensi energi, penggunaan sistem mutu digital, pelatihan operator, serta kepatuhan lingkungan. Negara perlu membantu, tetapi bantuan harus memindahkan perusahaan ke posisi yang lebih baik, bukan sekadar menunda kemunduran.

b. Pergeseran dari *cut-make-trim* ke rantai nilai yang lebih lengkap

Banyak industri tekstil berkembang terjebak pada pekerjaan *cut-make-trim* yang marjinnya tipis dan sangat mudah dipindahkan lintas negara. Untuk keluar dari jebakan itu, Indonesia perlu memperkuat hulu-menengah-hilir secara terintegrasi: serat, benang, kain, pewarnaan/finishing, garmen, *branding*, dan distribusi. Ini tidak berarti semua tahapan harus 100 persen lokal, tetapi semakin dalam struktur industri, semakin kecil kerentanan terhadap relokasi order mendadak.

Di sinilah pengembangan serat berbasis sumber daya domestik layak dipikirkan ulang. Indonesia memiliki basis pertanian dan biomassa besar; pengembangan serat campuran, *technical textiles*, atau bahan tekstil berbasis selulosa dan biomaterial tertentu dapat menjadi jembatan antara strategi tekstil dan strategi agro. Dalam konteks global ketika standar keberlanjutan makin ketat, cerita asal bahan baku yang terlacak

dan lebih ramah lingkungan dapat menjadi nilai tambah, bukan sekadar atribut pemasaran. Argumentasi ini sejalan dengan peringatan UNCTAD bahwa material baru dan teknologi hijau akan mengubah peta persaingan global. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

c. Kepastian pasar: domestik, ekspor, dan pengadaan

Industri tekstil tidak mungkin hidup hanya dari belas kasihan pasar. Negara perlu memastikan tiga jalur permintaan. Pertama, pasar domestik harus dijaga dari praktik curang dan impor tidak fair. Langkah anti-dumping Indonesia atas nylon film dari China, Thailand, dan Taiwan pada 2025 memperlihatkan bahwa instrumen perdagangan sah dapat digunakan untuk melindungi industri domestik dari praktik yang merugikan. Prinsip ini penting: proteksi yang cerdas bukan anti-pasar, melainkan cara memberi ruang bernapas agar industri domestik bersaing secara wajar. ([Reuters](#))

Kedua, pasar ekspor harus didiversifikasi. Ketergantungan berlebih pada beberapa pasar maju berisiko tinggi ketika tarif, resesi, atau perubahan selera terjadi. Pergeseran rantai pasok H&M dan tekanan tarif terhadap importir pakaian di AS menunjukkan bahwa arsitektur ekspor sekarang lebih cair dan lebih politis. Indonesia harus aktif memburu ceruk pasar baru, termasuk pasar regional, Timur Tengah, Afrika, dan segmen *private label* yang memerlukan pemasok andal. ([Reuters](#))

Ketiga, pemerintah dapat memainkan peran lewat *public procurement*. Seragam sekolah, seragam aparat, perlengkapan kesehatan berbahan tekstil, hingga kebutuhan BUMN dapat menjadi jangkar permintaan bagi produsen domestik, selama desain kebijakannya transparan dan mutu dijaga.

d. Tekstil hijau sebagai strategi daya saing, bukan beban

Kesalahan umum kebijakan adalah menganggap keberlanjutan sebagai tambahan biaya semata. Padahal, Reuters mencatat bahwa di sektor

fesyen, investasi pada energi terbarukan dan efisiensi energi justru dapat memberi *return on investment* yang jelas bagi pemasok dan merek. Untuk Indonesia, tekstil hijau berarti penghematan air, efisiensi energi boiler, pengolahan limbah, dan penggunaan listrik yang semakin bersih. Ini bukan sekadar agenda lingkungan; ini adalah agenda akses pasar dan pembiayaan. Pabrik yang bisa menunjukkan kinerja ESG yang kredibel cenderung lebih mudah memperoleh pembeli premium, kredit transisi, dan kontrak jangka panjang. ([Reuters](#))

Bayangkan sebuah kawasan tekstil di Jawa Barat yang selama ini hidup dari order musiman. Dalam model lama, pabrik bersaing dengan menekan upah, menunda peremajaan mesin, dan mengorbankan kualitas lingkungan. Dalam model baru, kawasan itu didorong menjadi *green textile cluster*: listriknya makin stabil, sebagian atap pabrik memakai PLTS, mesin pemintalan diremajakan, pengolahan air limbah dikelola bersama, dan data produksi dipantau digital. Upah boleh tetap kompetitif, tetapi sumber daya utama kawasan bukan lagi “murah”, melainkan **andal, cepat, dan patuh standar**. Itulah lompatan yang perlu dilakukan.

5. Strategi Agroindustri: Mengubah Ekonomi Ladang Menjadi Ekonomi Pabrik

Bila tekstil adalah wajah klasik industri padat karya perkotaan dan semi-perkotaan, maka agroindustri adalah wajah industrialisasi yang menyambungkan desa dengan manufaktur. Ia penting karena Indonesia bukan hanya negara berpenduduk besar, tetapi juga negara dengan basis sumber daya hayati, pertanian, perkebunan, dan kelautan yang sangat luas. Masalahnya, terlalu banyak nilai tambah yang masih berhenti pada penjualan bahan mentah atau olahan minimal.

Secara struktural, industri makanan dan minuman adalah tulang punggung manufaktur Indonesia. Kemenperin mencatat bahwa industri pangan menyumbang 39,10 persen PDB industri pengolahan nonmigas

pada 2023, atau 6,55 persen dari total PDB nasional, dengan nilai ekspor menembus US\$41,70 miliar. Dalam siaran BPS triwulan II 2025, pertumbuhan industri pengolahan juga terutama ditopang oleh makanan dan minuman. Bank Dunia bahkan menegaskan bahwa pengolahan makanan bersama apparel merupakan dua sektor manufaktur terbesar Indonesia, baik dari sisi nilai tambah maupun pekerjaan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa strategi agro bukan “pelengkap”; ia adalah pusat reindustrialisasi itu sendiri.

(ikm.kemenperin.go.id)

a. Dari ekspor komoditas ke ekspor produk

Agroindustri yang kuat lahir ketika negara tidak puas mengekspor hasil primer. Kopi bukan hanya biji kopi, tetapi juga *roasted beans*, *instant specialty*, minuman siap saji, ekstrak, dan *branding* asal daerah. Kakao bukan hanya biji, tetapi juga pasta, butter, powder, cokelat jadi, dan produk turunannya. Kelapa bukan hanya kopra, tetapi juga santan, *virgin coconut oil*, serat, arang aktif, *cocopeat*, dan produk gaya hidup. Kelapa sawit tidak berhenti pada CPO, tetapi masuk ke oleokimia, biofuel, surfaktan, dan bahan baku industri lain. Perikanan tidak berhenti pada ikan segar, tetapi masuk ke *cold chain*, pengalengan, *ready-to-cook*, kolagen, pakan, dan produk kesehatan.

Logika kebijakannya sederhana: setiap tahap pengolahan tambahan menciptakan pekerjaan tambahan, kebutuhan mesin tambahan, logistik tambahan, standar tambahan, dan pada akhirnya pembelajaran industri tambahan. Negara yang hanya mengekspor komoditas mentah mengekspor juga kesempatan belajar industrinya.

b. Menyatukan wilayah produksi dengan wilayah pengolahan

Masalah klasik agro di banyak negara berkembang adalah jarak antara pusat produksi bahan baku dan pusat pengolahan. Petani bekerja keras, tetapi nilai tambah terbesar tercipta jauh dari mereka. Jalan keluarnya

ialah pendekatan *processing close to source*: fasilitas sortasi, pendinginan, pengeringan, penggilingan, pengemasan, atau pengolahan tahap awal didekatkan ke sumber bahan baku. Pengalaman internasional menunjukkan pendekatan ini efektif. Bank Dunia, misalnya, melaporkan bahwa penguatan kapasitas pengolahan kacang mete di Pantai Gading meningkatkan kapasitas domestik secara signifikan dan menciptakan ribuan pekerjaan, mayoritas bagi perempuan. Di Nigeria, pengembangan *Special Agro-Industrial Processing Zones* juga diarahkan untuk menempatkan fasilitas pengolahan lebih dekat ke kawasan produksi guna mengurangi kehilangan pascapanen dan memperkuat rantai nilai. ([World Bank](#))

Indonesia dapat mengadaptasi logika serupa: Sulawesi untuk kakao, kopi, kelapa, dan perikanan; Sumatra untuk sawit, karet, kopi, dan pangan olahan; Jawa untuk integrasi pangan olahan dan pasar domestik; Nusa Tenggara untuk ternak, garam, rumput laut; Maluku dan Papua untuk perikanan dan hasil hutan tertentu. Dengan demikian, agroindustri menjadi alat pembangunan wilayah, bukan hanya kegiatan pabrik di kota besar.

c. Membangun agro sebagai industri, bukan sekadar perdagangan hasil tani

Agroindustri sering terjebak menjadi bisnis beli-jual bahan baku, bukan sistem industri. Padahal yang dibutuhkan adalah standar kualitas, *traceability*, pasokan terjadwal, kontrak kemitraan, laboratorium mutu, pembiayaan gudang, dan kepastian energi rantai dingin. Jika tidak, pabrik selalu hidup dalam kecemasan: bahan baku tidak konsisten, kualitas naik-turun, harga liar, dan logistik bocor. Reindustrialisasi agro berarti mengubah budaya transaksi menjadi budaya sistem.

Bayangkan sebuah kabupaten penghasil kakao. Dalam pola lama, petani menjual biji kering ke pengepul; sebagian kualitas hilang, harga fluktuatif, anak muda pergi ke kota. Dalam pola baru, kabupaten itu

memiliki pusat fermentasi, pengeringan modern, laboratorium mutu, pabrik pasta kakao skala menengah, sekolah vokasi pengolahan pangan, dan pembangkit biomassa kecil dari limbah pertanian setempat. Yang dijual bukan hanya kakao, tetapi *quality-controlled cocoa ingredients*. Di situ pekerjaan tumbuh di ladang, gudang, laboratorium, transportasi, dan pabrik sekaligus.

d. Agroindustri sebagai jawaban atas pemerataan dan formalisasi

Kelebihan besar agroindustri dibanding manufaktur tertentu adalah kemampuannya menghubungkan basis produksi pedesaan dengan pekerjaan formal dan semi-formal. Ini sangat penting untuk Indonesia, karena ketimpangan wilayah sering berkaitan dengan lemahnya transformasi ekonomi di luar Jawa. Jika tekstil cenderung terkonsentrasi pada kluster tertentu, agroindustri dapat menjadi strategi yang lebih tersebar secara geografis.

Agroindustri juga memiliki dimensi gender dan sosial yang penting. Banyak tahapan sortasi, pengemasan, pengolahan, dan administrasi mutu membuka kesempatan kerja bagi perempuan dan pekerja lokal yang selama ini kurang terserap pekerjaan formal. Dengan desain yang benar, agroindustri bisa menjadi mesin *inclusive growth*.

e. Keterbatasan yang harus diakui

Namun agroindustri bukan tanpa risiko. Ketergantungan pada musim, perubahan iklim, penyakit tanaman, serta standar sanitasi dan *phyto-sanitary* yang makin ketat dapat menjadi hambatan serius. Karena itu, strategi agroindustri harus dipadukan dengan riset benih, penyuluhan, irigasi, *cold chain*, asuransi, dan sistem mutu. Di sinilah kembali terlihat bahwa reindustrialisasi bukan urusan pabrik semata; ia adalah orkestrasi lintas sektor.

6. Strategi Energi: Fondasi Daya Saing yang Sering Diremehkan

Tidak ada kebijakan industri yang akan berhasil bila fondasi energinya rapuh. Tekstil membutuhkan listrik stabil untuk pemintalan, penenunan, pewarnaan, dan *finishing*. Agroindustri membutuhkan listrik untuk pendinginan, pengeringan, penggilingan, *packing*, dan *cold chain*. Industri yang tumbuh tanpa energi yang andal akan segera tersandung oleh biaya tak terlihat: *downtime*, kerusakan produk, kebutuhan genset, dan kehilangan kepercayaan pembeli.

Indonesia telah mengirim beberapa sinyal kebijakan yang relevan. Kementerian ESDM menetapkan tarif listrik PLN triwulan III 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap, dengan alasan menjaga daya beli dan daya saing industri. ESDM juga menegaskan kebijakan HGBT ditujukan untuk memperkuat daya saing industri domestik dan efisiensi anggaran negara. Sementara itu, RUPTL 2025–2034 menempatkan pembangunan *green super grid* sepanjang 47.758 kms dan *smart grid* sebagai tulang punggung penyaluran listrik dari sumber EBT menuju pusat kebutuhan, termasuk kawasan industri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat energi bukan sekadar sektor utilitas, tetapi infrastruktur daya saing. ([Kementerian ESDM](#))

a. Energi murah bukan satu-satunya tujuan; energi andal lebih penting

Sering kali diskusi publik hanya berkisar pada apakah tarif listrik naik atau turun. Padahal bagi industri, terutama yang beroperasi dengan tenggat ekspor dan standar mutu ketat, keandalan pasokan hampir sama pentingnya dengan harga. Listrik yang sedikit lebih mahal tetapi stabil sering lebih baik daripada listrik nominal murah namun sering terganggu. Karena itu, strategi energi industri harus menekankan tiga unsur sekaligus: harga yang kompetitif, keandalan sistem, dan visibilitas jangka menengah atas tarif serta pasokan.

b. Gas dan panas industri

Banyak subsektor industri, termasuk makanan olahan, keramik, kaca, kimia, dan sebagian proses tekstil, bergantung pada panas industri. Debat yang sedang berlangsung di Eropa tentang biaya energi dan masa depan panas industri menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sepele. Reuters melaporkan bahwa pembuat kebijakan Eropa sedang menyiapkan langkah terkait teknologi panas industri sebagai bagian dari upaya mempertahankan basis industri mereka. Bagi Indonesia, ini berarti strategi energi industri harus melampaui listrik dan menyentuh ketersediaan gas, biomassa, panas proses, dan opsi elektrifikasi industri yang masuk akal. ([Reuters](#))

c. Energi hijau sebagai pengurang risiko pasar

IEA mencatat pertumbuhan konsumsi listrik global 4,3 persen pada 2024, dengan industri menyumbang hampir 40 persen dari pertumbuhan tersebut. Dalam jangka panjang, industri yang pasokan energinya makin bersih akan memperoleh dua manfaat sekaligus: pertama, pengurangan risiko terhadap volatilitas energi fosil; kedua, posisi yang lebih baik dalam menghadapi standar pasar dan pembiayaan hijau. Dengan RUPTL 2025–2034 yang makin menekankan integrasi EBT, *storage*, dan *smart grid*, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menawarkan kepada investor sebuah narasi baru: bukan hanya tenaga kerja kompetitif, tetapi juga listrik industri yang makin andal dan makin rendah emisi. ([IEA](#))

d. Integrasi energi dengan kawasan industri

Salah satu kesalahan banyak kebijakan industri adalah membangun kawasan industri tanpa desain energi yang memadai. Ke depan, kawasan tekstil, pangan, dan agro seharusnya dirancang dengan pendekatan *energy-first*: pasokan listrik utama, cadangan, manajemen beban, potensi PLTS atap, pemanfaatan biomassa/biogas lokal, dan sistem audit energi. Pada kawasan agro, limbah biomassa dapat menjadi sumber energi proses; pada kawasan tekstil, efisiensi motor, kompresor, dan panas dapat memangkas biaya secara signifikan.

Bayangkan sebuah kawasan pengolahan kelapa di Sulawesi Utara. Jika energi kawasan semata mengandalkan pasokan standar tanpa desain efisiensi, margin usaha akan tipis. Tetapi bila limbah tempurung dan serabut digunakan untuk energi termal, atap gudang memanfaatkan PLTS, dan rantai dingin ditopang listrik yang stabil, maka biaya per unit bisa turun dan daya saing meningkat. Strategi energi dalam kasus ini bukan “tambahan”, melainkan inti model bisnis.

7. Mengapa Poros Tekstil–Agro–Energi Harus Dibangun Bersama?

Banyak kebijakan industri gagal karena bekerja dalam kotak-kotak sektoral. Tekstil dikelola sebagai urusan tekstil, agro sebagai urusan pertanian, energi sebagai urusan utilitas. Padahal, kekuatan strategi justru lahir dari persilangan.

a. Tekstil membutuhkan agro dan energi

Tekstil modern tidak hanya bergantung pada kapas atau serat sintetis impor. Di masa depan, ia akan makin terkait dengan serat berbasis biomassa, bahan pewarna yang lebih ramah lingkungan, kemasan, serta tuntutan jejak karbon yang rendah. Itu berarti hubungan dengan agro dan energi semakin kuat. Tekstil hijau tanpa energi yang lebih bersih hanyalah slogan.

b. Agro membutuhkan tekstil dan energi

Agroindustri membutuhkan karung, kemasan, *technical textiles*, geotekstil, jaring, kain filter, hingga material pendukung logistik. Dengan kata lain, kebangkitan tekstil dapat memperkuat daya saing agro. Sementara energi menentukan apakah produk agro bisa diproses, disimpan, dan dikirim tanpa kehilangan nilai.

c. Energi membutuhkan agro

Dalam konteks tertentu, biomassa, biogas, biodiesel, bioetanol, dan bioavtur membuka ruang integrasi antara kebijakan energi dan agro.

BKPM sendiri menempatkan biofuel sebagai salah satu komoditas hilirisasi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM fosil, memperkuat neraca perdagangan, dan mendukung transisi energi hijau. Ini menandakan bahwa sektor agro bukan hanya sumber pangan dan bahan baku industri, tetapi juga bagian dari strategi energi nasional. ([Kementerian PPID BKPM](#))

Ketika ketiga sektor ini dibangun bersama, muncul efek pengganda yang lebih besar. Sebuah klaster agroindustri yang tumbuh akan menciptakan permintaan bagi tekstil kemasan dan logistik, sekaligus justifikasi ekonomi bagi investasi energi lokal. Sebuah klaster tekstil yang hijau akan menarik pemasok bahan baku berbasis agro dan penyedia energi bersih. Sebuah kebijakan energi yang berpihak pada industri akan menurunkan biaya produksi di kedua sektor lainnya.

Dalam bahasa kebijakan, inilah yang disebut **industrial ecosystem approach**. Negara tidak hanya memberi insentif kepada satu pabrik, tetapi merancang ekosistem di mana pelaku usaha, pemasok, sekolah vokasi, bank, laboratorium, dan jaringan energi bertumbuh bersama.

8. Arsitektur Kebijakan: Apa yang Harus Dilakukan Negara?

Kebangkitan industri padat karya tidak terjadi otomatis. Ia memerlukan negara yang aktif, tetapi bukan negara yang serba mengatur secara mikro. Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu memilih prioritas, memperbaiki hambatan nyata, dan menegakkan disiplin kebijakan.

a. Deregulasi yang menysar bottleneck

Reuters pada Maret 2025 mencatat bahwa Presiden Prabowo memerintahkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan di industri padat karya. Arah ini tepat, tetapi kualitas deregulasi harus dijaga. Deregulasi yang baik adalah yang memotong waktu, biaya, dan ketidakpastian, tanpa merusak perlindungan lingkungan dan pekerja.

Yang harus dihapus ialah duplikasi izin, birokrasi yang tidak perlu, dan biaya transaksi yang membebani investasi. ([Reuters](#))

b. Pembiayaan produktif, bukan konsumtif

KIPK adalah langkah penting karena ia menyalurkan subsidi bunga ke investasi mesin dan modal kerja produktif. Namun skema semacam ini sebaiknya dikembangkan lebih lanjut menjadi *industrial upgrading finance*: kredit berbunga ringan bagi pembelian mesin hemat energi, digitalisasi produksi, sertifikasi mutu, pengolahan limbah, dan fasilitas *testing*. Dengan kata lain, pembiayaan industri harus dikaitkan langsung dengan kenaikan kemampuan produksi dan kualitas.

c. Perlindungan cerdas dan legal

Di dunia yang makin proteksionis, naif bila Indonesia percaya pada pasar bebas yang steril. Tetapi proteksi juga tidak boleh membutakan industri dari kebutuhan naik kelas. Karena itu, instrumen seperti anti-dumping, *safeguards*, dan pengawasan impor harus digunakan secara selektif dan berbasis bukti, sambil tetap memberi sinyal bahwa perlindungan hanya sah jika disertai investasi produktivitas. Proteksi tanpa upgrading akan menghasilkan industri manja; upgrading tanpa perlindungan minimal dapat membuat industri mati sebelum sempat belajar.

d. Kebijakan keterampilan

Karena sektor sasaran adalah tekstil, agro, dan energi, maka desain keterampilan harus spesifik: operator mesin tekstil modern, teknisi pewarnaan dan *finishing*, analis mutu pangan, operator *cold chain*, teknisi boiler dan biomassa, auditor energi, pengelola limbah, desainer pola digital, dan supervisor produksi. Pendidikan vokasi sering gagal karena terlalu umum. Yang dibutuhkan industri adalah keterampilan yang relevan, terukur, dan dekat dengan lokasi produksi.

e. Kebijakan wilayah berbasis klaster

Indonesia terlalu luas untuk memakai strategi satu resep nasional. Kluster TPT di Jawa Barat dan Jawa Tengah memerlukan pendekatan berbeda dari kluster kakao Sulawesi, perikanan Maluku, atau kelapa di Sulawesi Utara. Negara pusat perlu menetapkan kerangka umum, tetapi pelaksanaan harus berbasis keunggulan lokal. Dengan begitu, reindustrialisasi menjadi proses yang territorial, bukan abstrak.

f. Tata kelola dan disiplin evaluasi

Setiap insentif industri harus disertai indikator hasil: berapa pekerjaan tercipta, berapa produktivitas naik, berapa konsumsi energi turun, berapa ekspor atau substitusi impor tercapai, berapa sertifikasi mutu diperoleh. Tanpa evaluasi, kebijakan industri mudah berubah menjadi sumber rente. Justru karena kebijakan industri kembali populer di seluruh dunia, disiplin tata kelola harus lebih kuat dari sebelumnya.

(UNIDO)

9. Risiko yang Harus Dihindari

Reindustrialisasi selalu membawa risiko. Risiko pertama adalah **jebakan upah murah**. Jika negara terlalu bangga pada tenaga kerja murah, maka perusahaan tidak terdorong berinovasi. Akibatnya, saat upah naik sedikit atau pesaing baru muncul, industri mudah goyah.

Risiko kedua adalah **zombifikasi industri**, yaitu pemberian insentif berulang kepada perusahaan yang secara struktural tidak mau atau tidak mampu melakukan upgrading. Karena itu, dukungan negara harus berbasis kinerja, bukan nostalgia.

Risiko ketiga adalah **pengabaian standar kerja dan lingkungan**. Industri padat karya yang tumbuh dengan menekan pekerja atau merusak lingkungan mungkin tampak kompetitif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah akan menghadapi boikot pasar, litigasi, atau krisis sosial. Pengalaman berbagai negara dalam rantai pasok

fesyen menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan kini langsung berkaitan dengan reputasi dan akses pasar. ([Reuters](#))

Risiko keempat adalah **ketergantungan berlebihan pada energi fosil murah**. Di tengah ketidakpastian harga minyak dan gas global, strategi itu terlalu berbahaya. Lonjakan harga akibat konflik geopolitik dapat dengan cepat merusak daya saing industri. Diversifikasi energi, efisiensi, dan penguatan EBT bukan idealisme, melainkan strategi manajemen risiko. ([Reuters](#))

Risiko kelima adalah **ketimpangan wilayah**. Jika reindustrialisasi hanya terkonsentrasi di beberapa koridor lama, maka manfaatnya terbatas dan tekanan urbanisasi akan membesar. Karena itu, agroindustri harus sengaja diposisikan sebagai instrumen penyebaran industri ke wilayah-wilayah yang lebih dekat ke sumber bahan baku.

10. Peta Jalan: Menuju Reindustrialisasi Inklusif 2026–2035

Agar argumen ini tidak berhenti sebagai wacana, berikut logika peta jalan yang realistis.

Tahap pertama: stabilisasi dan penyelamatan terarah (1–2 tahun)

Fokus pada subsektor yang sudah ada namun tertekan: tekstil, pakaian jadi, alas kaki, pangan olahan, furnitur. Gunakan KIPK, deregulasi izin, pengawasan impor, dan penataan pasar domestik. Prioritasnya mencegah keruntuhan kapasitas produksi yang masih layak sambil memaksa modernisasi mesin dan proses. ([KPAII](#))

Tahap kedua: pendalaman dan integrasi rantai nilai (3–5 tahun)

Bangun klaster yang menghubungkan bahan baku, pengolahan, logistik, pelatihan, laboratorium, dan energi. Pada tekstil, dorong integrasi hulu-menengah-hilir dan *green compliance*. Pada agro, dorong *processing close to source, cold chain*, dan kontrak pasok. Pada energi, percepat

konektivitas grid dan desain kawasan industri yang hemat energi. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Tahap ketiga: upgrading teknologi dan pasar (5–10 tahun)

Geser posisi Indonesia dari pemasok biaya rendah menjadi pemasok yang cepat, patuh standar, dan makin rendah emisi. Ini menuntut investasi pada otomasi selektif, AI untuk penjadwalan dan mutu, desain produk, *branding*, serta integrasi pembiayaan hijau. Dalam tahap ini, industri padat karya tidak hilang, tetapi berevolusi menjadi industri padat karya-produktif.

Penutup

Reindustrialisasi Indonesia tidak boleh dipahami sebagai proyek menghidupkan kembali masa lalu. Ia adalah proyek menyiapkan masa depan dengan realistis. Dunia sedang berubah: pertumbuhan global melambat, perdagangan makin terfragmentasi, biaya energi menjadi penentu lokasi industri, dan otomasi mengubah kalkulasi lama tentang keunggulan tenaga kerja murah. Dalam situasi seperti itu, Indonesia memerlukan strategi yang berani namun membumi.

Poros **tekstil–agro–energi** menawarkan jalan yang masuk akal. Tekstil penting karena cepat menyerap tenaga kerja dan tetap relevan dalam ekspor serta pasar domestik. Agro penting karena mengubah kekayaan hayati Indonesia menjadi nilai tambah industri yang tersebar di wilayah. Energi penting karena tanpa pasokan yang andal dan kompetitif, semua strategi industri akan rapuh. Ketiganya, bila dirancang bersama, dapat menghasilkan bukan hanya pertumbuhan output, tetapi juga pekerjaan formal, pemerataan wilayah, pembelajaran teknologi, dan daya tahan ekonomi.

Akhirnya, kebangkitan industri padat karya yang dibutuhkan Indonesia bukanlah kebangkitan industri murah yang rapuh. Yang dibutuhkan ialah **industri padat karya yang disiplin, modern, hemat energi,**

terhubung ke rantai nilai, dan naik kelas secara bertahap.

Reindustrialisasi yang demikian akan membuat Indonesia tidak sekadar menjadi tempat produksi, tetapi menjadi ruang pembelajaran nasional—tempat tenaga kerja tumbuh menjadi teknisi, pelaku usaha tumbuh menjadi inovator, dan sumber daya alam tumbuh menjadi nilai tambah yang memperkuat kedaulatan ekonomi.

Beberapa perkembangan terbaru yang relevan:

[Reuters](#)

Pada pesan berikutnya, naskah ini dapat disusun menjadi versi makalah jurnal lengkap dengan abstrak, kata kunci, glosarium, dan daftar pustaka.

Berikut **glosarium** dan **daftar pustaka** pelengkap untuk makalah **“Reindustrialisasi dan kebangkitan industri padat karya: strategi tekstil–agro–energi di tengah tekanan global.”**

Glosarium

Reindustrialisasi: proses penguatan kembali basis manufaktur suatu negara agar lebih dalam struktur industrinya, lebih tinggi produktivitasnya, lebih besar penciptaan kerjanya, dan lebih relevan terhadap tantangan baru seperti digitalisasi serta dekarbonisasi. ([UNIDO](#))

Industri padat karya: sektor industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dibandingkan intensitas modalnya, misalnya tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan sebagian industri makanan. Dalam konteks

Indonesia, sektor ini diprioritaskan karena perannya dalam membuka lapangan kerja dan menjaga daya saing industri nasional. ([KPAII](#))

Produktivitas industri: kemampuan sektor atau perusahaan menghasilkan output yang lebih besar dari input yang digunakan, terutama tenaga kerja, mesin, energi, dan bahan baku. Dalam laporan Bank Dunia, rendahnya produktivitas menjadi salah satu hambatan utama manufaktur Indonesia untuk naik kelas.

Revitalisasi mesin: pembaruan atau penggantian mesin/peralatan produksi agar proses industri menjadi lebih efisien, lebih hemat energi, lebih konsisten mutunya, dan lebih kompetitif. Program KIPK secara eksplisit diarahkan untuk tujuan ini. ([KPAII](#))

Nilai tambah (value added): tambahan nilai ekonomi yang tercipta ketika bahan mentah atau barang antara diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi. Dalam industri, ukuran ini penting karena menunjukkan kedalaman proses produksi dan kontribusi riil sektor terhadap PDB. ([KPAII](#))

Rantai nilai (value chain): rangkaian kegiatan dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga layanan kepada konsumen akhir. Kekuatan industri tidak hanya ditentukan oleh pabrik, tetapi oleh seberapa baik ia terhubung di seluruh rantai nilai. ([Reuters](#))

Technology frontier: batas terdepan tingkat kecanggihan teknologi yang dicapai perusahaan-perusahaan paling maju. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa banyak perusahaan besar Indonesia, termasuk di sektor makanan dan apparel, masih jauh dari batas ini.

Hilirisasi: strategi mengolah komoditas primer menjadi produk antara atau produk akhir yang memiliki nilai tambah, kandungan teknologi, dan dampak penyerapan kerja yang lebih besar. Dalam konteks biofuel dan agroindustri, hilirisasi menjadi instrumen penting transformasi ekonomi. ([BKPM PPID](#))

Agroindustri: kegiatan industri yang berbasis pada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kehutanan, yang mengubah hasil primer menjadi produk olahan konsumsi atau bahan baku lanjutan. Agroindustri penting karena menghubungkan ekonomi desa dengan sistem manufaktur. ([DJIKMA](#))

Regional supply chains / nearshoring: kecenderungan perusahaan memendekkan atau mendekatkan rantai pasok ke pasar utama agar pengiriman lebih cepat, risiko tarif lebih kecil, dan gangguan geopolitik lebih mudah dikelola. Pergeseran H&M menjadi contoh arah ini. ([Reuters](#))

Dekarbonisasi industri: upaya menurunkan emisi karbon dari proses produksi melalui efisiensi energi, elektrifikasi, energi terbarukan, teknologi bersih, dan pengelolaan proses yang lebih baik. UNIDO menempatkan dekarbonisasi sebagai bagian inti dari era baru kebijakan industri. ([UNIDO](#))

KIPK (Kredit Industri Padat Karya): fasilitas kredit berbunga subsidi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung industri padat karya melalui pembelian mesin baru, modal kerja tertentu, dan pembiayaan ulang peralatan, dengan tujuan memperluas kerja dan meningkatkan produktivitas. ([KPAII](#))

HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu): kebijakan penetapan harga gas bagi sektor tertentu untuk mendorong daya saing industri, efisiensi biaya produksi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. ([Kementerian ESDM](#))

Green super grid: jaringan transmisi listrik skala besar yang dirancang untuk menyalurkan listrik dari sumber energi baru-terbarukan yang tersebar ke pusat-pusat permintaan, termasuk kawasan industri dan kota-kota besar. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Anti-dumping duty (bea masuk anti-dumping): instrumen perdagangan yang dikenakan pada impor yang dinilai dijual dengan

harga tidak wajar dan merugikan industri domestik, sebagai bentuk perlindungan dagang yang sah menurut aturan perdagangan. ([Reuters](#))

Daya saing industri: kemampuan industri menghasilkan barang secara efisien, bermutu, tepat waktu, dan sesuai standar pasar, dengan ditopang oleh energi, teknologi, pembiayaan, logistik, serta kebijakan yang mendukung. ([Kementerian ESDM](#))

Global jobs gap: selisih antara jumlah orang yang ingin bekerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia atau dapat diakses secara layak. Konsep ini menjelaskan mengapa industri padat karya tetap penting bagi negara berkembang. ([International Labour Organization](#))

Daftar Pustaka

International Energy Agency. (2025). *Electricity*. Dalam *Global Energy Review 2025*. ([IEA](#))

International Labour Organization. (2025). *World Employment and Social Outlook: Trends 2025*. ([International Labour Organization](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, 27 Juni). *Tarif Listrik PLN Triwulan III 2025 Tetap, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Daya Saing*. ([Kementerian ESDM](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, 28 Februari). *Skema Baru HGBT: Perkuat Daya Saing Industri dan Efisiensi Anggaran Negara*. ([Kementerian ESDM](#))

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024, 16 Desember). *Kemenperin Mitrakan IKM Pangan dan Industri Besar melalui Business Matching*. ([DJIKMA](#))

Rudy C Tarumingkeng : Reindustrialisasi dan Kebangkitan Industri
Padat Karya - Strategi Tekstil–Agro–Energi di Tengah Tekanan Global

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal KPAII. (2025, 20 Agustus). *Dorong Lapangan Kerja, Kemenperin Luncurkan Kredit Industri Padat Karya*. ([KPAII](#))

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal KPAII. (2025, 7 November). *Kinerja Industri Manufaktur Tumbuh Positif, Kemenperin Pamerkan Capaian Program Unggulan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran*. ([KPAII](#))

PT PLN (Persero). (2025, 3 Juni). *RUPTL 2025–2034: PLN Siap Bangun Green Super Grid Sepanjang 47.758 KMS*. ([PT PLN \(Persero\)](#))

Reuters. (2025, 30 Januari). *H&M speeds up shift to regional supply chains amid tariff threat*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 12 Maret). *Indonesia to impose anti-dumping import duty for nylon film from China, Thailand, Taiwan*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 19 Maret). *Indonesia has prepared investment credits to cover 5% of interest from loans for labour intensive industries*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 12 Mei). *Sustainability is no longer in fashion, but the apparel industry's future depends on it*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, 26 Mei). *Italy's fashion brands sign accord to fight worker exploitation*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, 11 Februari). *Fix energy prices to be competitive, business leaders tell EU*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, 27 Februari). *Europe policymakers set for make or break decisions on industrial heat*. ([Reuters](#))

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent (Overview)*. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Rudy C Tarumingkeng : Reindustrialisasi dan Kebangkitan Industri
Padat Karya - Strategi Tekstil–Agro–Energi di Tengah Tekanan Global

United Nations Industrial Development Organization. (2024). *Industrial Development Report 2024: Turning Challenges into Sustainable Solutions—The New Era of Industrial Policy*. ([UNIDO](#))

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Unleashing Indonesia's Business Potential*. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *Global Economic Prospects, January 2025*. ([Open Knowledge Bank](#))

World Bank. (2025, 15 April). *Agri-processing adds value in Cote d'Ivoire's cashew industry*. ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth & Jobs Report: Running Faster, for Longer—Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs*.

World Trade Organization. (2025). *Global Trade Outlook and Statistics: Update, October 2025*.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 2 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a50369-a840-839b-86d1-944d856c7820>